KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : TKA SMA dimulai, komisi X harapkan perbaikan pendidikan
Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

TKA SMA Dimulai

Komisi X Harapkan Perbaikan Pendidikan



FOTO: TEDY AKBAR/RM.ID

Lestari Moerdijat

TES Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat mulai digelar secara nasional pada Senin (26/10/2026). Senayan berpendapat angka partisipasi TKA yang tinggi baru bermakna jika data yang dihasilkan benar-benar berujung pada perbaikan pembelajaran di ruang kelas.

Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengatakan, hasil TKA 2026 jenjang SD dan SMP yang dirilis Mei 2026 menunjukkan persoalan mendasar yang belum terjawab. Yaitu rata-rata numerasi siswa SMP hanya 40,34, sementara literasi 60,83. Hanya 9,67 persen dari 4,2 juta siswa SMP yang masuk kategori baik dalam matematika. "Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie sapaan akrabnya, Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, pendaftaran TKA 2026 jenjang SMA/SMK/MA mencapai 3,86 juta peserta atau 91,72 persen dari total calon peserta. Pelaksanaan utama TKA SMA/sederajat dibagi menjadi dua gelombang reguler dan dua gelombang khusus. Gelombang pertama berlangsung pada 26–29 Oktober, sedangkan gelombang kedua pada 2–5 November 2026.

Rerie melanjutkan, TKA mesti menjadi peta jalan untuk intervensi presisi, bukan sekadar ajang pemetaan yang berhenti di atas kertas. Apalagi Pemerintah sudah mempunyai data secara rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu berdasarkan hasil TKA sebelumnya. "Pertanyaannya sekarang, apakah Pemerintah Pusat (Pempus), dinas pendidikan (disdik), kepala sekolah, guru, hingga orang tua benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" tanya politisi Nasdem ini.

Diketahui, intervensi presisi TKA adalah pendekatan kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia yang menggunakan data hasil TKA secara spesifik untuk merancang perbaikan pembelajaran yang tepat sasaran.

Rerie mengungkap, sistem pelaksanaan TKA berbasis komputer masih menghadapi tantangan dasar. Data Pemerintah menunjukkan sekitar 23 persen satuan pendidikan di Indonesia belum terkoneksi internet. Keterbatasan perangkat dan jaringan membuat sejumlah sekolah harus menggelar tes dalam beberapa gelombang, bahkan meminjam perangkat untuk memastikan siswa dapat mengikuti asesmen.

Kondisi ini, menurut Rerie, memunculkan pertanyaan tentang keadilan hasil. Jika infrastruktur saja belum setara, bagaimana mungkin skor TKA dapat dibaca sebagai ukuran yang adil bagi seluruh peserta. "Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujar Wakil Ketua MPR ini mengingatkan. ■ TIF